

*Enforcement of Islamic Sharia and the Ideological Battle of Right Islam
vs Center Islam Post-Reformation in Bugis Land*

**Penegakkan Syariat Islam dan Pertarungan Ideologi Islam
Kanan vs Islam Tengah Pasca Reformasi di Tanah Bugis**

Muhammad Dalle^{1✉}, Muhammad Jundi²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Indonesia

✉ muhammaddalle96@gmail.com

Received: 002-04-2024

Revised: 27-04-2024

Accepted: 28-04-2024

ABSTRACT

The Committee for the Preparation of the Implementation of Islamic Law (Komite Persiapan Penerapan Syariat Islam/KPPSI) faces dynamics of pros and cons in South Sulawesi, where Right-wing Islam supports it through various Islamic organizations outside of NU and Muhammadiyah, and is influenced by former figures of DI/TII South Sulawesi who established Islamic educational institutions such as Darul Istiqomah Maros and Darul Huffaz Tjuhtujub Bone. Additionally, support comes from descendants of Kabar Muzakkar who are active in religious and political activities, such as Aziz Kabar, who plays a significant role in the political arena, including as a member of the Regional Representative Council (DPD RI) and a figure in Hidayatullah Sulawesi Selatan. On the other hand, Moderate Islam, which is affiliated with NU and represented by alumni of As'adiyah and figures of DDI, tends to oppose KPPSI, although there are DDI cadres who support it. However, these differences in views do not breed hatred, as KPPSI's movement in securing political legitimacy within the framework of democracy has strengthened the position of Right-wing Islam, and KPPSI is considered a positive representation for the Bugis community in articulating the aspirations of political Islam within the context of democracy.

Keywords: moderate Islam, right-wing Islam, bugis community



ABSTRAK

Komite Persiapan Penerapan Syariat Islam (KPPSI) menghadapi dinamika pro dan kontra di Sulawesi Selatan, di mana Islam kanan mendukungnya melalui berbagai organisasi Islam di luar NU dan Muhammadiyah, dan dipengaruhi oleh tokoh-tokoh mantan DI/TII Sulawesi Selatan yang mendirikan lembaga pendidikan Islam seperti Darul Istiqomah Maros dan Darul Huffaz Tujuhtujuh Bone. Selain itu, dukungan datang dari keturunan Kahar Muzakkar yang aktif dalam kegiatan keagamaan dan politik, seperti Aziz Kahar, yang memainkan peran penting dalam arena politik, termasuk sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dan tokoh dalam Hidayatullah Sulawesi Selatan. Di sisi lain, Islam tengah, yang berafiliasi dengan NU dan diwakili oleh alumni As'adiyah serta tokoh DDI, cenderung menentang KPPSI, meskipun ada kader DDI yang mendukungnya. Namun, perbedaan pandangan ini tidak menimbulkan kebencian, karena gerakan KPPSI dalam mengamankan legitimasi politik dalam kerangka demokrasi telah memperkuat posisi Islam sayap kanan, dan KPPSI dianggap sebagai representasi positif bagi komunitas Bugis dalam mengartikulasikan aspirasi Islam politik dalam konteks demokrasi.

Kata Kunci: Islam tengah; Islam kanan; masyarakat bugis

PENDAHULUAN

Indonesia pernah dihadapkan pada perlawanan beberapa kelompok Islam yang masih terpaku pada penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Kelompok-kelompok Islam ini mendirikan berbagai organisasi seperti Darul Islam Jawa Barat, Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), Ansharullah di Sulawesi Selatan, dan Kesatuan Rakyat Jang Tertindas (KRJT) di Kalimantan Selatan, yang semuanya memiliki orientasi Islam kanan. Mereka berusaha mewujudkan konsep Indonesia yang berlandaskan Islam secara simbolik, dan mengklaim kekuasaan di wilayahnya masing-masing. Organisasi-organisasi ini, kecuali Darul Islam, lebih mudah diredam karena jaringannya bersifat lokal. Darul Islam sulit ditumpas karena berperang secara gerilya di gunung-gunung tropis, dengan dukungan logistik dari masyarakat sipil. Sementara itu, Ansharullah terdiri dari kelompok bangsawan Bugis yang berpengalaman dalam pertempuran kemerdekaan di Jawa dan Sulawesi.¹

¹ Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam: Pembaharuan Islam di Indonesia Abad XX*, Cet. 1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996).

Pada tahun 1819, pengaruh salafisme mulai muncul di tanah Bugis, dan pada tahun 1821, Raja Wajo La Memmang To Appamadeng Puangna Raden Galla menerima pengaruh ulama Bugis yang baru kembali dari Mekkah. Raja La Memmang kemudian memberlakukan Syariah secara ketat di wilayahnya, termasuk menerapkan hukuman rajam, potong tangan, dan kewajiban bagi wanita untuk memakai cadar. Selain itu, ia juga memugar dan membangun masjid-masjid serta mendatangkan ulama dari Madinah untuk menguatkan agama Islam di Wajo. Pada tahun 1920, pengaruh salafisme semakin bertambah di daerah tersebut.² Pada tahun 1930, ulama Bugis yang konservatif mendorong Raja Bone untuk meminta fatwa dari Syaikh Sayyid Ahmad Shadaqah bin Dahlan terkait tarekat Khalwatiyyah yang banyak diikuti di wilayah tersebut. Fatwa tersebut mengharamkan tarekat khalwatiyyah dan menyatakannya sebagai aliran sesat, yang kemudian didukung oleh ulama Bugis lainnya. Mulai tahun 1953 hingga 1965, gerakan DI-TIII melarang praktik takhayul bid'ah dan khurafat, termasuk aliran tarekat, meskipun beberapa anggotanya tetap melakukan praktik tarekat secara diam-diam.^{3,4,5}

VOC di Sulawesi Selatan dianggap telah merusak syariah Islam dengan memisahkan antara adat dan agama Islam. Pada tahun 1957, di bawah inisiatif Raja Gowa, diadakanlah Kongres Pembangunan Masyarakat Islam daerah Sulawesi Selatan di Malino pada bulan Desember. Kongres ini didukung oleh berbagai pihak termasuk Andi Matalata Panglima Kodam Sulawesi Tenggara, Andi Muhammad Yusuf Komando Resimen Sulawesi Selatan, Panglima Antiani, Raja Gowa, Raja Luwu, dan Raja Bone. Meskipun demikian, setelah kongres tersebut, gerakan penegakkan syariah Islam mengalami penurunan. Kongres ini diprakarsai oleh NU dan Muhammadiyah serta didukung oleh forum persaudaraan Islam lainnya. Sementara itu, beberapa organisasi lain yang turut mendukung termasuk Hizbut Tahrir, Wahdah Islamiyah, Hidayatullah, Qadariah, LDII, dan berbagai ormas Islam lainnya, kecuali Ahmadiyah dan Jamaah Taklim.⁶

² Muhammad Dalle, "Unveiling Salafi Puritanism Indoctrination: A Case Study of an Islamic Boarding School for Girls in Malang," *Ta'limDiniyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 4, no. 1 (29 Oktober 2023): 140–56.

³ Christian Pelras, *Manusia Bugis*, 1 ed. (Jakarta: Nalar Bekerjasama dengan Jakarta-Faris Ecole Francaised'Extreme-Orient, 2006).

⁴ Muhammad Zaitun Rasmin, Pendidikan Islam Dalam Perspektif Ulama Bugis KH. Lanre Said, *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 7, No. 1 (April 2018), h. 67," n.d.

⁵ Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat; Tradisi Tradisi Islam di Indonesia*, 3 ed. (Bandung: Mizan, 1999).

⁶ Alamsyah dkk, *Rekaman Proses Seminar Internasional ke Sembilan "Politik Identitas: Agama, Entitas, dan Ruang/Space dalam Dinamika Politik Lokal di Indonesia dan Asia Tenggara" Dinamika Politik Lokal di Indonesia*, Cet. 1 (Salatiga: Persemaian Cinta Kemanusiaan (Percik), 2009).

KPPSI (Komite Persiapan Penerapan Syariat Islam) menuntut otonomi khusus dalam penerapan Syariat Islam. Hal ini didasarkan pada dua alasan utama. Pertama, Sulawesi Selatan didominasi oleh suku mayoritas Islam seperti Bugis Makassar dan Mandar. Kedua, gerakan Syariat Islam di Bugis juga memiliki peran dalam menahan penyebaran komunisme. Namun, yang membedakan KPPSI dari gerakan lain seperti NU dan Muhammadiyah adalah keinginan untuk membuat Syariat Islam sebagai aturan formal negara. Sementara NU dan Muhammadiyah memandang Syariat Islam sebagai sesuatu yang wajib dilaksanakan, tetapi tidak perlu diformalisasikan.⁷

Aroma gerakan Darul Islam masih kental di daerah-daerah yang berkeinginan menerapkan Syariah Islam. Sekitar 23 dari 53 kabupaten/kota di Indonesia yang menerapkan perda syariah memiliki hubungan dengan masa lalu DI/TII. Lebih dari setengah, yaitu 50 dari 78 perda syariah, diperjuangkan dan didukung oleh keturunan serta simpatisan DI/TII. Di Sulawesi Selatan, formalisasi syariah banyak dipengaruhi oleh Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), yang didukung oleh Abu Bakar Ba'asyir. Pada Kongres kedua KPPSI pada Desember 2010, dihasilkan sebuah proposal yang menawarkan otonomi khusus untuk penerapan Syariah Islam di Sulawesi Selatan.⁸ Hal ini mencerminkan adanya pengaruh sejarah DI/TII dalam pembentukan kebijakan Syariah Islam. Meskipun demikian, Islam NU dan Muhammadiyah, sebagai dua sayap penting dalam perjuangan Islam, tetap menunjukkan kebutuhan akan kerjasama untuk membangun Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip Neo Modernisme yang dipromosikan oleh Fazlur Rahman.⁹

Untuk lebih memahami fokus penelitian terhadap Penegakkan Syariat Islam dan Pertarungan Ideologi Islam Kanan vs Islam Tengah Pasca Reformasi di Tanah Bugis, telah dilakukan penelaahan terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Salah satunya adalah penelitian Rahmatunnair pada tahun 2020 yang menemukan bahwa paradigma penegakan syariat Islam dalam sistem hukum di Sulawesi Selatan, seperti yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam, dan penerapan syariat Islam dalam bentuk peraturan daerah masyarakat Bugis Tellumpocoe, kurang menyatu dengan kearifan lokal, namun cukup memberi

⁷ Haedar Nashir, *Islam Syariat; Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, Cet. 1 (Bandung: Mizan, 2013).

⁸ Muchamad Ali Safa'at, *Dinamika Negara & Islam; dalam Perkembangan Hukum dan Politik di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Penerbit Konstitusi Press (Kopress), 2018).

⁹ Fauzan Saleh, *Teologi Pembaruan; Pergeseran Wacana Islam Sunni di Indonesia Abad XX*, Cet. 1 (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004).

warna pada kebudayaan Bugis yang tidak melulu berasaskan kearifan lokal.¹⁰ Selain itu, penelitian Ariesman dan Iskandar pada tahun 2020 juga menemukan perkembangan hukum Islam di Sulawesi Selatan dimulai saat raja Tallo, I Malingkang Daeng Mannyonri, atau Sultan Abdullah Awwalul Islam, dan eksistensinya di zaman moderen seperti lahirnya KPPSI (Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam), program Masjid di Makassar, dan berbagai peraturan daerah menurut inisiatif pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa.¹¹ Kemudian, penelitian Ahmad Faisal dkk pada tahun 2023 menemukan hambatan utama bahwa para ulama menentang rencana tersebut karena pemahaman epistemologis mereka terhadap syariah dan pendekatan strategis dalam mengadvokasinya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). secara politis, mengusung wacana substantif - kultural daripada formalistik dan struktural karena Sulawesi Selatan alasan diberi otonomi khusus seperti Aceh.¹²

Ulama kontemporer yang berpendidikan dan berpengalaman meragukan keberhasilan KPPSI, disebabkan oleh kegagalan politiknya, ketidakmurnian perjuangannya, dan kurangnya akomodasi terhadap aspirasi umat Islam. Penelitian menunjukkan adanya penurunan dalam penerapan formalisme syariat Islam, namun substansialisme syariah Islam semakin menguat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memfokuskan pada politik ideologi KPPSI Sulawesi Selatan dan bagaimana mereka mempertahankan doktrin mereka di Tanah Bugis. Dengan demikian, judul penelitian diangkat menjadi "Penegakan Syariat Islam di Tanah Bugis dan Pertarungan Ideologi Islam Kanan vs Islam Tengah".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode induksi dimana analisis dimulai dari memaparkan hal-hal unik dan menarik yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum atau digeneralisasi. Secara khusus menggunakan jenis induksi analitik yaitu penafsiran atau pemahaman atas hal hal yang diteliti berdasarkan menggunakan angka. Menurut Suwardi Endraswara ada 7 langkah dalam induksi analitik yaitu: 1) membuat batas batas yang bersifat umum tentang fenomena yang

¹⁰ Rahmatunnair Rahmatunnair, "Dinamika penegakan syariat Islam di Sulawesi Selatan: Studi kasus di Kerajaan Bugis Tellumpocoe," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 19, no. 2 (29 Desember 2020): 1122–32.

¹¹ Ariesman Ariesman dan Iskandar Iskandar, "Studi Eksistensi Hukum Islam Pada Peraturan Daerah Di Sulawesi Selatan," *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 1 (24 April 2020): 93–105, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i1.130>.

¹² Ahmad Faisal dkk., "Sociological and Political Constraints of Islamic Sharia Enforcement in South Sulawesi Indonesia," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 22, no. 1 (24 Juni 2023): 159–69, <https://doi.org/10.31958/juris.v22i1.8604>.

dijelaskan, 2) memberi hipotesis guna menjelaskan fenomena yang diamati menurut data yang didapat, atau penelitian orang lain atau ide peneliti, 3) fokus pada satu kasus kemudian dilihat apakah sesuai dengan hipotesis, 4) jika kasus tidak dapat tergambarkan oleh hipotesis maka hipotesis harus diubah atau fenomena harus dirumuskan kembali, 5) mencari kasus-kasus negatif dengan tujuan membatalkan hipotesis, 6) jika kasus negatif didapat maka rumuskan kembali hipotesis atau rumuskan kembali fenomena, 7) teruskan usaha-usaha itu sampai lahir suatu isyarat yang kuat dengan mengamati berbagai kasus yang tidak sama.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Geneologi Islam Tengah

Islam Tengah, dipengaruhi oleh pemikiran Fazlul Rahman dan ajaran Aswaja Asy'ariyyah Maturidiyyah,¹⁴ menekankan pemimpin Kementerian Agama harus berasal dari NU.¹⁵ Pada 1952, NU keluar dari Masyumi setelah petingginya menunjuk menteri agama dari Muhammadiyah. Pihak modernis menolak penunjukan tersebut dengan tuduhan penyelewengan uang.¹⁶ Pada 1935, NU mengeluarkan fatwa "wajib mempertahankan Negara Hindia Belanda". Hal ini menarik karena menurut Imam Nawawi, jika dar al-Islam yang dikuasai non-Muslim masih memungkinkan umat Islam untuk hidup damai, maka tetap dianggap dar al-Islam. Namun, jika penguasa non-Muslim menghalangi umat Islam dalam beribadah, maka dar al-Islam harus dianggap sebagai dar al-harb, dan penguasa non-Muslim tersebut wajib diperangi.¹⁷

Islam Tengah, yang mengusung semangat neo-modernisme atau Islam progresif, pada awalnya mendukung narasi Negara Islam, terutama hingga sekitar tahun 1950-an. Pemikiran ini tercermin dalam buku berjudul "Gus Dur NU dan Masyarakat Sipil", yang menyoroti bahwa hingga tahun 1955, NU masih teguh bahwa Indonesia harus berdasarkan Syariah Islam. KH Wahab Hasbullah bahkan mengungkapkan keinginannya agar Indonesia didasarkan pada Syariah Islam dan

¹³ Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Kebudayaan*, Cet. 5 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021).

¹⁴ Zuly Qodir, *Pembabaran Pemikiran Islam; Wacana dan Aksi Islam Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

¹⁵ Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1987).

¹⁶ Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam: Pembabaran Islam di Indonesia Abad XX*.

¹⁷ A. Qodry Azizy dkk, *Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta: STAIN Ternate, Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Depag RI, dan Pustaka Pelajar, 2005).

sistem demokrasi yang Islami.¹⁸ Meskipun demikian, dinamika politik kemudian memicu perubahan dalam pemikiran ini, terutama dengan pemaksaan asas tunggal oleh rezim Soeharto.¹⁹

Pemikiran Islam Tengah, yang mengusung prinsip "Ummatan Washatan", berakar dari ide dan pemikiran para ulama, khususnya dalam mengikuti empat mazhab utama, yang dikenal sebagai Salaf Al-Ummah. Cenderung mengikuti mazhab Syafi'i dan tasawuf Al-Ghazali, Islam Tengah menempatkan penekanan pada jihad an-nafs (perjuangan melawan hawa nafsu) sebelum jihad perang.²⁰ Meskipun mazhab Syafi'i menganggap jihad (Qital) sebagai fardhu kifayah (kewajiban kolektif), Al-Ghazali menekankan bahwa jika kelompok yang berjuang masih lemah, negara terdekat harus membantu dengan mengirimkan kekuatan tentara. Terdapat pula pemahaman bahwa reformasi moral lebih penting daripada reformasi alat-alat perang.²¹

Gus Dur, dalam pemikirannya, menolak keharusan mendirikan negara Islam, yang menjadi alasan mudah bagi ayahnya dan pengikut NU untuk menerima Pancasila.²² Sementara itu, formalisasi hukum Islam dianggap akan merusak persatuan bangsa, menurut Said Aqil Siradj.²³ Menurut Harun Nasution, Al-Quran tidak mengharuskan bentuk negara, melainkan lebih menekankan pada prinsip-prinsip²⁴ seperti yang dicontohkan oleh Zainal Abidin Ahmad.²⁵

Islam Tengah di Bugis memiliki representasi melalui beberapa gerakan seperti As'adiyah, DDI (Darud Da'wah Wal Irsyad), Tareqat Khalwatiyyah Yusuf dan Khalwatiyyah Samman, serta Rabithah Ulama, yang secara prinsip sejalan dengan Ahlusunnah Wal Jamaah di Jawa. NU mulai merambah ke Bugis melalui organisasi, dengan mayoritas peminatnya berasal dari alumni DDI atau

¹⁸ Muhammad Dalle, "Deklarasi Anies - Muhaimin Dan Konflik Ideologi NU Versus PKS Di Pentas Politik Nasional," *JRP (Jurnal Review Politik)* 13, no. 2 (31 Desember 2023): 230–52, <https://doi.org/10.15642/jrp.2023.13.2.230-252>.

¹⁹ Ellyasa KH. Dharwis, *Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil*, Cet. 2 (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 1997).

²⁰ As'ad Said Ali, *Pergolakan di Jantung Traisi NU yang Saya Amati*, Cet. 1 (Jakarta: LP3ES Indonesia, 2008).

²¹ Adian Husaini, *Hegemoni Kristen-Barat dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi*, Cet. 3 (Depok: Gema Insani, 2016).

²² Greg Barton and Greg Fealy, *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*, Cet. 1 (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 1997).

²³ Mastuki HS, *Kiai Menggugat; Mengadili Pemikiran Kang Said*, Cet. 1 (Jakarta: Fatma Press, 1999).

²⁴ Zainal Abidin Ahmad mengatakan ciri ciri negara Islam yaitu: 1) mayoritas Islam penduduknya, 2) beragama Islam pemimpinnya, 3) Ideologinya tak bertentangan dengan syariah secara substantif, 4) UU tidak bertentangan dengan Islam dan 5) undang undang dasar mengandung nilai syuro dan demokrasi.

²⁵ Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, Cet. 5 (Bandung: Mizan, 1998).

As'adiyyah. As'adiyyah sendiri berdiri pada tahun 1929 atas gagasan Anregurutta Sade. Pada tahun 1931, pertemuan ulama Bugis diadakan untuk membahas pendidikan bergaya madrasah dan isu-isu lainnya, yang dihadiri oleh 26 ulama Bugis, termasuk Anregurutta Sade, dengan hasil kesepakatan yang signifikan.²⁶ DDI, yang didirikan oleh Anregurutta Ambo Dalle, menjadi lembaga pendidikan formal yang kuat, tidak hanya berpengaruh secara kultural, tetapi juga politik dan sosial.²⁷ Rabithah Ulama, meskipun tidak bertahan lama, berperan penting dalam membangun NU di Bugis, dengan para anggotanya berasal dari kalangan *qadhi* di Kerajaan Bugis. Ide pendiriannya diinisiasi oleh Anregurutta Ahmad Bone, dan organisasi ini memiliki hubungan yang mirip dengan MUI, tetapi lebih independen. Pertemuan antara Rabithah Ulama dan NU terjadi pada tahun 1947, ketika KH. Wahid Hasyim meminta Anregurutta Ahmad Bone untuk mendirikan cabang NU di Sulawesi Selatan. Namun, Anregurutta Ahmad Bone menolak dan menunjuk beberapa tokoh lainnya untuk memimpin. Rabithah Ulama berhasil merangkul para raja Bugis dalam keanggotaannya karena hubungan yang erat antara raja dan *qadhi*, yang mempermudah proses penyebaran NU di Bugis.²⁸ Namun, tidak semua ulama Bugis mengikuti arus ini, seperti yang ditunjukkan oleh sikap Anregurutta Abdurahman Ambo Dalle yang berani melawan Kahar Muzakkar, meskipun banyak ulama Bugis yang ikut mendukung Kahar Muzakkar, bahkan menjadi menteri dalam kabinet Negara Islam Kahar Muzakkar.²⁹

Geneologi Islam Kanan di Sulawesi Selatan

Menurut Abul Hasan Al Asy'ari, Islam Kanan merupakan golongan yang kurang aktif dalam proses berfikir, seringkali mengkritik dan menolak rasionalitas ulama serta para filosof hanya dengan mengacu pada satu dalil, tanpa mempertimbangkan konteks yang lebih luas.³⁰ Mereka juga cenderung menilai negatif terhadap demokrasi ala Barat, dengan menganggapnya sebagai sistem yang

²⁶ Muhamad Murtadlo, *Dinamika Sejarah Madrasah di Asia Tenggara*, Cet. 1 (Ciputat: UIN Jakarta Press, 2018).

²⁷ Muhammad Dalle dan Muhammad Jundi, "Socio-Politics of the Bugis People and Islamization of the East Sulawesi Society during the Dutch Colonial Period," *HEURISTIK: Jurnal Pendidikan Sejarah* 1, no. 2 (30 Agustus 2021): 90–106, <https://doi.org/10.31258/hjps.1.2.90-106>; Muhammad Dalle dan Muhammad Jundi, "The Role of Ulama and Umara in the Modernization of Islamic Education in Bugis Land in the 20th Century," *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 1 (8 Agustus 2022): 137–59, <https://doi.org/10.21274/taalum.2022.10.1.137-159>.

²⁸ Suaidi Asyari, *Nalar Politik NU & Muhammadiyah; Over Crossing Java Sentris*, Cet. 2 (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2010).

²⁹ Muhammad Dalle dan Muhammad Jundi, "Ulama dan Umara dalam Modernisasi Pendidikan Islam di Tanah Bugis Abad XX," *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 1 (8 Agustus 2022): 137–59, <https://doi.org/10.21274/taalum.2022.10.1.137-159>.

³⁰ Nurcholish Madjid, *Khazanah Intelektual Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1985).

berpotensi merendahkan martabat ulama dan menganggap setiap suara memiliki nilai yang sama, tanpa membedakan antara suara dari ulama dan suara dari golongan yang tidak berkompeten. Pandangan ini dianggap berbahaya, karena dapat mengakibatkan dominasi golongan yang tidak berkualifikasi dalam mengatur urusan agama dan masyarakat.³¹ Muhammad Iqbal, seorang pemikir Islam, menyatakan bahwa agama dan negara tidak dapat dipisahkan, karena pemisahan ini dapat menimbulkan penyimpangan dalam politik. Bagi Iqbal, mereka yang menyatakan politik sebagai sesuatu yang kotor dan ingin menjauhkannya dari agama adalah orang-orang yang tidak berani menghadapi tantangan.³²

Muhammad Abduh, seorang tokoh Islam yang mengikuti pemikiran Ibn Taimiyah dan Ibn Abdul Wahab, berpandangan bahwa Islam yang ideal adalah Islam yang sesuai dengan pemahaman salaf as-shalih dan sebaiknya meninggalkan perdebatan agama yang tidak relevan dengan kurun waktu awal umat Islam.³³ Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Abduh, namun tidak sepenuhnya mengadopsi pemikiran tersebut, melainkan juga mengadopsi pemahaman fiqh syafi'i dan tauhid Asy'ari.³⁴ M. Natsir menilai Pancasila sebagai sesuatu yang kurang substansial dan mengusulkan Islam sebagai dasar negara yang lebih kokoh.³⁵ Suaidi Asyari menunjukkan bahwa Muhammadiyah membawa pandangan baru tentang Islam ketika memperluas keberadaannya di luar pulau Jawa, sementara NU cenderung hanya memberi label NU pada lembaga yang sudah ada, tanpa membawa perubahan substansial secara kultural.

Islam Kanan di Bugis mengikuti paham Muhammadiyah lama yang berakar pada pemikiran Ibn Taimiyah. Pemikiran Ibn Taimiyah bersifat tekstualis, mengutamakan nash, dan menolak gagasan yang timbul melalui logika filsafat. Menurutny, akal hanya digunakan untuk membenarkan apa yang telah diberitakan nash. Pemikiran Ibn Taimiyah juga menolak ta'wil dan mengadopsi

³¹ Hasbullah Masudin Yamin, *Perfektif Demokrasi untuk Islam Indonesia (Si'arkan Syari'at atas Nama Pancasila)*, Ed. 1, Cet. 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

³² Fazlur Rahman, *Gelombang Perubahan dalam Islam; Studi tentang Fundamentalisme Islam*, Cet. 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000).

³³ Rifat Syaumi Nawawi, *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh; Kajian Masalah Akidah dan Ibadat*, Cet. 1 (Jakarta: Paramadina, 2002).

³⁴ Sahilun A. Nasir, *Pemikiran Kalam (Teologi Islam); Sejarah, Ajaran, dan Perkembangannya*, Ed. 1-2, Cet. 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

³⁵ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara; Studi Tentang Perdebatan dalam Konstituante* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006).

tafwidh atas ayat-ayat mutasyabihah.³⁶ Muhammadiyah di Bugis mudah berkembang karena adanya As-Sirath Al-Mustaqim yang didirikan pada tahun 1917 oleh Haji Abdullah Abdurahman dari Bulukumba, yang memiliki pengalaman belajar selama 10 tahun di Mekkah sebelum kembali ke Makassar untuk mendirikan Madrasah As-Sirath Al-Mustaqim. Muhammadiyah tidak hanya membangun sekolah, tetapi juga infrastruktur sosial seperti masjid, layanan kesehatan, dan koperasi. Guru-guru dikirim langsung dari Jawa ke beberapa daerah di Sulawesi Selatan, termasuk Makassar, Bantaeng, Parepare, Luwu, Majene, dan Rappang.

Setiap cabang Muhammadiyah yang didirikan akan membuka cabang baru, seperti yang terjadi pada tahun 1928 ketika cabang Muhammadiyah di Sengkang, Wajo, menggagas pengembangan Muhammadiyah di Batubatu, Soppeng, dan Luwu. Pada tahun berikutnya, Muhammadiyah Wajo mengadakan muktamar se-Sulawesi Selatan, menjadikannya sebagai kekuatan gerakan Islam yang paling besar di Bugis. Pada tanggal 30 Agustus 1930, Wasir Nuri (anggota Muhammadiyah) dan Sitti Hayyanah (anggota Aisiyah) datang ke Wajo dan melantik Andi Coma sebagai ketua Aisiyah, yang menyebabkan perempuan Bugis semakin diberi kebebasan dalam melakukan kegiatan sosial keagamaan seperti kenduri. Menurut Suaidi Asyari, bukanlah kekuatan Muhammadiyah yang membuat organisasi ini berkembang pesat di Bugis, melainkan kesetiaan masyarakat Bugis pada As-Siratal Mustaqim, yang mendorong mereka untuk bergabung dengan Muhammadiyah.³⁷

Awalnya, Muhammadiyah menegaskan konsep negara Islam dan menolak penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Ki Bagus Hadikusumo, ketua PB Muhammadiyah pada saat itu, meneguhkan sikap tersebut meskipun sudah diberi masukan oleh Moh Hatta, Wahid Hasyim, dan Teuku Muhammad Hasan. Sebaliknya, Soekarno mendukung penghapusan kata-kata tersebut dengan alasan sementara, dengan rencana untuk merumuskan kembali undang-undang setelah 12 bulan terbentuknya MPR. Ki Bagus Hadikusumo akhirnya menerima penghapusan tersebut atas dasar kesepakatan tersebut.³⁸ Menurut Amin Abdullah, Muhammadiyah merupakan organisasi yang berperan aktif dalam menyelesaikan masalah sosial tanpa terjebak dalam perdebatan teologis, karena ayat dan hadis dengan pemahaman progresif dapat memberikan solusi konkret bagi masalah

³⁶ Mustofa Muhammad Asy-Syak'ah, *Islam Tidak Bermazhab*, Cet. 3 (Jakarta: Gema Insani Press, 1994).

³⁷ Suaidi Asyari, *Nalar Politik NU & Muhammadiyah; Over Crossing Java Sentris*.

³⁸ Bahrus Surur-Iyunk, *Teologi Amal Saleh; Membongkar Nalar Kalam Muhammadiyah Kontemporer*, Cet. 1 (Surabaya: Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat (LPAM), 2005).

umat.³⁹ Pada masa reformasi 1998, umat Islam mengajukan permintaan kepada parlemen untuk mengesahkan kembali 7 kata dalam Piagam Jakarta, namun usaha tersebut mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut memicu munculnya gerakan perda syariah di daerah-daerah mayoritas Islam, termasuk di Bugis.

Selain itu, perbedaan pandangan dalam kontroversi penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta tidak hanya mencerminkan dinamika dalam Muhammadiyah, tetapi juga memberikan gambaran tentang peran organisasi keagamaan dalam menghadapi perubahan zaman. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ibn Khaldun yang membedakan dua bentuk penerapan Syariah Islam, yang menunjukkan kompleksitas dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip agama dalam konteks kekinian. Ibn Khaldun membedakan dua bentuk penerapan Syariah Islam, yaitu eksklusif dan inklusif. Penerapan eksklusif mengacu pada gaya penerapan syariah yang tekstual, ketat, dan simbolik sebagai aturan hidup tertinggi manusia. Sementara itu, penerapan inklusif mengaitkan syariah dengan konteks zaman yang lebih lentur.⁴⁰

KPPSI (Komite Persiapan Penerapan Syariat Islam) di Tanah Bugis

Komite Persiapan Penerapan Syariat Islam (KPPSI) dibentuk pada tahun 2000 dengan tujuan mewujudkan otonomi khusus Sulawesi Selatan dalam penerapan Syariat Islam. Pada bulan Desember 2001, KPPSI merilis rancangan undang-undang untuk pemberlakuan Syariat Islam dan mengadvokasi agar Provinsi Sulawesi Selatan diberikan status serupa dengan Aceh. Pertemuan KPPSI di Sulawesi Selatan diawasi ketat oleh Laskar Jundullah, yang merupakan sayap militer KPPSI. Namun, setelah terungkapnya keterlibatan Laskar Jundullah dalam beberapa tindak kriminal, KPPSI memutuskan untuk menjauhkan diri dari kelompok tersebut. Salah satu pendukung KPPSI yang vokal dalam menyuarakan aspirasinya adalah Aziz Kahar, anak dari Kahar Muzakkar.⁴¹ Oleh karena itu, KPPSI sering disebut sebagai Neo-Kaharisme legal.⁴²

Ada dua motif KPPSI dalam penegakan Syariat Islam di Sulawesi Selatan: pertama, karena rezim Soeharto dan Soekarno dianggap sekuler dan tidak akomodatif terhadap Syariah Islam; kedua, karena terinspirasi oleh penerapan Syariah Islam di Aceh dan keinginan untuk membangun kembali kultur lokal yang sangat Islamis di Sulawesi Selatan. Dalam tubuh KPPSI, terdapat empat unsur

³⁹ Fauzan Saleh, *Teologi Pembaruan; Pergeseran Wacana Islam Sunni di Indonesia Abad XX*.

⁴⁰ A. Qodry Azizy dkk, *Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia*.

⁴¹ Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken dan Ireen Karang Hogenboom, *Politik Lokal di Indonesia*, Cet. 3 (Jakarta: yayasan pustaka obor indonesia, KITLV-Jakarta, 2014).

⁴² Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken dan Ireen Karang Hogenboom.

kelompok dengan tujuan yang sama, yaitu penegakan Syariat Islam di Sulawesi Selatan. Unsur tersebut meliputi formalis muda konstitusionalis (kalangan HMI-MPO), Laskar Jundullah (barisan militer KPPSI), Konstitusionalis Tua (para elit pejabat yang terlibat dalam aktivisme Islam), dan kelompok moderat (akademisi lulusan Institut Agama Islam).⁴³

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan kajian tentang Islam dan radikalisme di Indonesia dengan fokus pada tiga gerakan, yaitu Jamaah Salafi Bandung, Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS), dan KPPSI Makassar. KPPSI menjalani perjuangan konstitusional melalui konsolidasi yang sehat dengan pemerintah daerah. Setelah kongres kedua KPPSI, gerakan tersebut berubah menjadi KPSI atau Komite untuk Pelaksanaan Syariat Islam. Kongres kedua melahirkan pernyataan Sulawesi Selatan sebagai otonomi khusus dan perluasan keanggotaan yang melibatkan hampir semua tokoh Sulawesi Selatan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Dengan demikian, upaya penegakkan Syariah Islam menjadi agenda utama dalam ranah eksekutif dan legislatif daerah.⁴⁴

Kritik Para Cendekiawan Muslim Indonesia terhadap KPPSI Sulsel

Azyumardi Azra mengkritik KPPSI sebagai tanda melemahnya Pancasila sebagai platform yang menyatukan pluralitas, akibat monopolisasi oleh Orde Baru yang menafsirkan Pancasila secara sekuler. Azra menegaskan perlunya reinterpretasi Pancasila berakar dari Syariah Islam.⁴⁵ Baginya, mencapai kekuasaan melalui nepotisme, monarki, dan kekerasan militer merupakan penghinaan terhadap Syariah Islam. Azra menyatakan bahwa orientasi negara syariah mengharapkan pemimpin yang saleh, namun tidak ada contoh negara Islam masa lalu yang menjadi rujukan. Penyebabnya, menurut Azra, adalah ketiadaan sistem yang lengkap dalam konsep negara Madinah dan kekhalifahan pasca Khulafaur Rasyidin, serta karena konsep negara hukum Islam masih dalam wacana. Azra menyarankan rumusan karakteristik pemerintahan Islam, pelebagaan matra politik, dan pola hubungan internasional yang sesuai dengan situasi global untuk memperjelas prototipe negara Islam.⁴⁶ Di Indonesia, syariat Islam memiliki dimensi internal dan eksternal, yang meliputi konsep negara Islam yang masih

⁴³ M. Zaki Mubarak, *Politik Syariat Islam: Ideologi dan Pragmatisme*, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial), 2018).

⁴⁴ M. Zaki Mubarak.

⁴⁵ Azyumardi Azra, *Hubungan Agama dan Negara, dalam buku Etika Politik dalam Konteks Indonesia*, Cet. 5 (Yogyakarta: Kanisius, 2005).

⁴⁶ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam; Dari Fundamentalisme, Modernisme, hingga Postmodernisme*, Cet. 1 (Jakarta Selatan: PARAMADINA, 1996).

diperdebatkan dan resistensi dari kalangan non-Muslim terhadap tindakan terorisme kelompok Islam radikal.⁴⁷

KPPSI terlibat dengan Al-Qaeda di Poso melalui anggota Kompak, sebuah organisasi yang didirikan pada 1998 oleh Dewan Dakwah Islamiyah (DDI) di bawah kepemimpinan Tamsil Linrung. Kompak tidak hanya memberikan bantuan logistik bagi korban di Poso, tetapi juga mengirim Mujahidin untuk berperang. Pada Juni 2000, Agus Dwi Karna, utusan Kompak, membawa bantuan logistik ke Poso melalui rute darat karena jalan Trans Sulawesi diblokade. Agus Dwi Karna juga merupakan perwakilan Al-Haramain Foundation Makassar. Di Poso, ia membangun markas besar Laskar Jundullah meskipun mayoritas penduduknya adalah Kristen. Parlindungan Siregar, agen Al-Qaeda dari Spanyol, membantu Agus Dwi Karna dalam membuat camp pelatihan Al-Qaeda di daerah tersebut.⁴⁸

Aziz Kahar, sebagai tokoh utama KPPSI di Sulawesi Selatan, menunjukkan keterlibatannya yang aktif dalam ranah politik praktis. Dia menunjukkan bahwa dia adalah seorang nasionalis dan moderat yang mengikuti jalur legal dalam memperjuangkan gagasannya. Kesuksesan Aziz Kahar dalam pemilihan legislatif menjadi anggota DPD RI Dapil Sulawesi Selatan dari tahun 2004 hingga 2019 menunjukkan adanya dukungan massa yang kuat terhadapnya. Namun, kegagalannya dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2018 saat berpasangan dengan Nurdin Halid juga menunjukkan bahwa masih ada mayoritas pemilih yang lebih condong kepada calon gubernur yang bersifat nasionalis dan moderat.

Golongan Kristen nasionalis, yang diwakili oleh Daniel Sopamena, menolak kemenangan kaum Islamis fundamentalis di Bugis. Mereka khawatir dengan upaya tokoh-tokoh yang ingin menerapkan Syariat Islam secara formal, dan merasa perlu untuk berdiskusi tentang tujuan yang ingin dicapai oleh gerakan tersebut.⁴⁹ Konsep negara Islam dipengaruhi oleh moralitas pemimpin dan kekuatan intelektual ulama. Contoh negatifnya dapat dilihat di negara seperti Arab Saudi, yang membatasi kebebasan berpikir intelektual, mengendalikan media, dan menindas kritik terhadap pemerintah. Di Pakistan, Zia Ul-Haq menunda pemilihan umum dan membatasi kebebasan media yang kritis. Ulama konservatif

⁴⁷ Hasbullah Masudin Yamin, *Perfektif Demokrasi untuk Islam Indonesia (Si'arkan Syari'at atas Nama Pancasila)*.

⁴⁸ As'ad Said Ali, *Al-Qaeda: Tinjauan Sosial –Politik Ideologi dan Sepak Terjangnya*, Cet. 2 (Jakarta: Pustaka LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial), 2014).

⁴⁹ Martin van Bruinessen, *Contemporary Development in Indonesian Islam; Explaining the "Conservative Turn"* (Pasir Panjang: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) Publishing, 2013).

di Pakistan juga pernah menentang Fazlul Rahman, yang kemudian hijrah ke Chicago, Amerika Serikat, karena pandangannya yang dianggap terlalu modern dalam buku yang berjudul "Islam".⁵⁰

Diskusi

Pertama, Jusuf Kalla, sebagai tokoh NU, menyampaikan keberatannya terhadap desakan KPPSI untuk mengimplementasikan syariah Islam melalui Perda. Menurutnya, syariah Islam berakar pada Al-Quran dan Hadis, tetapi desakan KPPSI tersebut dianggap merendahkan kedudukan Al-Quran dan Hadis di bawah UUD dan peraturan negara lainnya. Meskipun berbeda pandangan, KPPSI tetap menjaga hubungan baik dengan Jusuf Kalla. Sikapnya yang menolak desakan KPPSI ini juga disampaikan kepada komunitas Kristen, menegaskan bahwa umat Islam dijamin kebebasan beragama dan negara mendukung pelaksanaan ajaran Islam, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi umat Kristen.⁵¹ Menurut pandangan Jusuf Kalla, Pancasila sudah final dan pentingnya adalah realisasinya, dengan pengertian bahwa setiap agama dapat menerapkan nilai-nilai universal Pancasila sesuai dengan bidang masing-masing.⁵²

Kedua, Jamal, selaku Direktur FKPMMP, dan Faried Wajdy, Direktur DDI Mangkoso, sebagai ulama lokal dan nasional, sepakat dengan pandangan Jusuf Kalla dalam menilai bahwa implementasi syariat Islam yang diadvokasi oleh KPPSI dapat berpotensi membahayakan, memicu kekerasan, dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang damai. Sebagai Ketua DDI, Faried Wajdy turut mewarisi pandangan dari Anregurutta Abdurahman Ambo Dalle yang menentang penerapan syariat Islam oleh KPPSI. Selain itu, Faried Wajdy juga menolak segala bentuk jihad bersenjata, termasuk pengiriman pasukan jihad ke Poso dan Maluku. Anregurutta Ambo Dalle bersama para alumni DDI mengambil inisiatif untuk berdialog dengan para biksu minoritas yang seringkali mengalami marginalisasi oleh masyarakat, dengan menggelar kegiatan di pesantren DDI Mangkoso. Meskipun Ambo Dalle telah tiada, gerakan ini tetap berlanjut.

Ketiga, Anregurutta Faried Wajdy juga mendapat pertentangan dari pesaing politiknya di internal DDI yaitu Direktur Pesantren Putri DDI Barru bernama Anregurutta Muiz Kabry.

⁵⁰ Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik; Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah dan HAM, Fundamentalisme, dan Antikorupsi*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2013).

⁵¹ Hamid Awaludin, *Solusi JK (Logis, Spontan, Tegas, dan Jenaka)*, Cet. 2 (Jakarta: Grasindo, 2016).

⁵² Sulaiman Effendi, *Kiprah & Pemikiran Politik Tokoh-Tokoh Bangsa*, Cet. 1 (Yogyakarta: IRCiSoD, 2014).

Keempat, Pesantren Darul Istiqomah, yang didirikan oleh Anregurutta Ahmad Marzuki Hasan, mantan menteri dalam kabinet Darul Islam atau DI/TII Kahar Muzakkar, memiliki pandangan yang berbeda dengan Dewan Dakwah Islamiyah (DDI), yang historisnya didirikan oleh Anregurutta Ahmad Marzuki Hasan. Anregurutta Ahmad Marzuki Hasan membangun DI dengan dukungan swadaya masyarakat lokal, sementara Pesantren Darul Istiqomah secara formal mendukung agenda KPPSI. Alumnus dari pesantren ini, seperti Agus Dwikarna, yang merupakan ketua Laskar Jundullah, sayap militer KPPSI, terlibat dalam pengiriman pasukan ke Poso dan Maluku. Agus Dwikarna ditangkap oleh kepolisian Filipina dengan tuduhan membawa bahan peledak dan terafiliasi dengan organisasi Jamaah Islamiyyah dan Gerakan Pembebasan Islam Moro.⁵³ Pondok Darul Istiqomah dan Darul Huffaz Tujuh Tujuh Bone memiliki kesamaan ideologi dengan pendiriannya yang bercorak Islam Kanan, mengabadikan perjuangan ideologis Islam Kanan di Tanah Bugis. Salah satu tokoh nasional alumni Tujuh Tujuh Bone, Bachtiar Nasir, adalah ketua alumni Saudi Arabia se-Indonesia dan ketua GNPf dalam aksi 212 di Jakarta yang menuntut pemerintah menindak Basuki Tjahya Purnama.⁵⁴

Kelima, Abraham Samad, mantan Ketua KPK, memiliki hubungan dekat dengan kelompok Islam Kanan, termasuk KPPSI. Dia menjadi pengacara pembela bagi Agus Dwikarna, pimpinan Laskar Jundullah, sayap KPPSI yang ditangkap di Filipina karena tuduhan terkait Al-Qaeda Poso. Selain itu, Abraham juga dekat dengan tokoh Hidayatullah Sulawesi Selatan, Aziz Kahar, putra Kahar Muzakkar, pentolan KPPSI. Rumahnya di Makassar dijadikan asrama bagi mahasiswa Hidayatullah. Abraham pernah bertemu dengan Abu Bakar Ba'asyir tahun 2009 di Makassar. Ketika terpilih sebagai ketua KPK, dukungan dari fraksi PKS, yang merupakan pendukung KPPSI Sulawesi Selatan, didapat dengan alasan track record yang bersih, usia yang relatif muda, janji untuk mundur jika target tidak tercapai dalam waktu 1 tahun, dan kesiapan untuk menggantung saudara kandungnya jika terbukti korupsi.⁵⁵

Kebangkitan Islam Kanan di Indonesia didorong oleh beberapa faktor. Pertama, menurunnya pengaruh gerakan Islam Liberal dan progresif, yang lebih fokus pada politik praktis daripada menjaga ideologi. Pendidikan Islam yang menekankan penegakan syariah, seperti Darul Istiqomah, Darul Huffaz Bone, dan

⁵³ Sri Yunanto, *Islam Moderat Vs islam Radikal: Dinamika Politik Islam Kontemporer*, Cet. 1 (Yogyakarta: Medpress, 2018).

⁵⁴ Muhammad Zaitun Rasmin, "Pendidikan Islam dalam Perspektif Ulama Bugis KH. Lanre Said."

⁵⁵ Burhanuddin El-Fanany, *Abraham Samad Ayam Jantan dari Timur Siap Berantas Korupsi Sampai Mati*, Cet. 1 (Yogyakarta: Araska, 2012).

Hidayatullah, secara konsisten memperkuat ideologi Islam Kanan. Kedua, perguruan tinggi Islam dari Saudi Arabia, seperti Wahdah Islamiyyah, telah melahirkan banyak alumni yang mendukung Islam Kanan, termasuk Agus Dwikarna. Ketiga, dukungan finansial dari Timur Tengah, seperti yang disalurkan oleh Agus Dwikarna ke Poso melalui dana Al-Haramain, menunjukkan bahwa penegakan syariah Islam mendapat dukungan dari negara-negara Arab. Keempat, pandangan anti-Pancasila yang mengacu pada pemikiran Ibn Taimiyyah membuat sulit bagi mereka yang berpaham tekstual untuk menerima Pancasila sebagai ajaran yang Islami secara substansial.⁵⁶

Jika kita menelaah dinamika pro dan kontra terkait KPPSI dari perspektif teori negara demokrasi ala Montesquieu, maka dapat dilihat bahwa Islam Kanan dengan dukungannya terhadap KPPSI hampir saja mencapai puncaknya. Hal ini terlihat ketika Aziz Kahar hampir berhasil meraih jabatan eksekutif sebagai wakil gubernur Sulawesi Selatan dalam Pilgub 2018. Namun, upaya ini terhalang oleh penolakan dari Jusuf Kalla, figur tokoh Islam Tengah yang memiliki pengaruh di tingkat nasional. Di sisi legislatif, banyak tokoh Islam Kanan yang telah berhasil mencapai tingkat nasional, seperti Aziz Kahar dan Tamsil Linrung. Sedangkan dalam ranah yudikatif, Abraham Samad mewakili Islam Kanan sebagai ketua KPK.⁵⁷

KESIMPULAN

Dalam dinamika pro dan kontra terkait KPPSI di Sulawesi Selatan, terdapat dua kutub utama yang mempengaruhinya, yaitu Islam Kanan yang cenderung mendukung KPPSI dan Islam Tengah yang cenderung menentangnya. Islam Kanan, yang diwakili oleh beberapa organisasi Islam di luar NU dan Muhammadiyah, serta dipengaruhi oleh mantan tokoh DI/TII Sulawesi Selatan, menunjukkan dukungannya melalui pendirian lembaga pendidikan Islam dan melalui peran tokoh-tokoh seperti Aziz Kahar dan beberapa keturunan Kahar Muzakkar yang aktif dalam kegiatan keagamaan dan politik. Di sisi lain, Islam Tengah, yang tergabung dalam NU dan diwakili oleh alumni As'adiyah dan tokoh-tokoh DDI, cenderung menentang KPPSI meskipun terdapat beberapa kader DDI yang mendukungnya. Namun, perbedaan pandangan ini tidak menghasilkan konflik yang berkepanjangan karena adanya kekuatan politik KPPSI dalam meraih legitimasi dalam ranah politik demokrasi. Pergerakan KPPSI dalam menggalang

⁵⁶ Martin van Bruinessen, *Contemporary Development in Indonesian Islam; Explaining the "Conservative Turn."*

⁵⁷ Ali Abdul Mu'ti Muhammad, *Filsafat Politik antara Barat dan Islam*, Cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2010).

dukungan politik, di dalam kerangka trias politica demokrasi, memberikan dorongan bagi kekuatan Islam Kanan, sementara KPPSI dianggap sebagai wadah yang positif bagi masyarakat Bugis dalam mengartikulasikan aspirasi politik Islam dalam konteks demokrasi.

REFERENSI

- A. Qodry Azizy dkk. *Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: STAIN Ternate, Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Depag RI, dan Pustaka Pelajar, 2005.
- Adian Husaini. *Hegemoni Kristen-Barat dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi*. Cet. 3. Depok: Gema Insani, 2016.
- Ahmad Syafii Maarif. *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara; Studi Tentang Perdebatan dalam Konstituante*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.
- Alamsyah dkk. *Rekaman Proses Seminar Internasional ke Sembilan "Politik Identitas: Agama, Entitas, dan Ruang/Space dalam Dinamika Politik Lokal di Indonesia dan Asia Tenggara" Dinamika Politik Lokal di Indonesia*. Cet. 1. Salatiga: Persemaian Cinta Kemanusiaan (Percik), 2009.
- Ali Abdul Mu'ti Muhammad. *Filsafat Politik antara Barat dan Islam*. Cet. 1. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Ariesman, Ariesman, dan Iskandar Iskandar. "Studi Eksistensi Hukum Islam Pada Peraturan Daerah Di Sulawesi Selatan." *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 1 (24 April 2020): 93–105. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i1.130>.
- As'ad Said Ali. *Al-Qaeda: Tinjauan Sosial –Politik Ideologi dan Sepak Terjangnya*. Cet. 2. Jakarta: Pustaka LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial), 2014.
- As'ad Said Ali. *Pergolakan di Jantung Traisi NU yang Saya Amati*. Cet. 1. Jakarta: LP3ES Indonesia, 2008.
- Azyumardi Azra. *Hubungan Agama dan Negara, dalam buku Etika Politik dalam Konteks Indonesia*. Cet. 5. Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- . *Pergolakan Politik Islam; Dari Fundamentalisme, Modernisme, hingga Postmodernisme*. Cet. 1. Jakarta Selatan: PARAMADINA, 1996.
- Bahrus Surur-Iyunk. *Teologi Amal Saleh; Membongkar Nalar Kalam Muhammadiyah Kontemporer*. Cet. 1. Surabaya: Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat (LPAM), 2005.
- Bruinessen, Martin Van. *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat; Tradisi Tradisi Islam di Indonesia*. 3 ed. Bandung: Mizan, 1999.
- Burhanuddin El-Fanany. *Abrabam Samad Ayam Jantan dari Timur Siap Berantas Korupsi Sampai Mati*. Cet. 1. Yogyakarta: Araska, 2012.

- Dalle, Muhammad. "Deklarasi Anies - Muhaimin Dan Konflik Ideologi NU Versus PKS Di Pentas Politik Nasional." *JRP (Jurnal Review Politik)* 13, no. 2 (31 Desember 2023): 230–52. <https://doi.org/10.15642/jrp.2023.13.2.230-252>.
- . "Unveiling Salafi Puritanism Indoctrination: A Case Study of an Islamic Boarding School for Girls in Malang." *Ta'limDiniyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 4, no. 1 (29 Oktober 2023): 140–56.
- Dalle, Muhammad, dan Muhammad Jundi. "Socio-Politics of the Bugis People and Islamization of the East Sulawesi Society during the Dutch Colonial Period." *HEURISTIK: Jurnal Pendidikan Sejarah* 1, no. 2 (30 Agustus 2021): 90–106. <https://doi.org/10.31258/hjps.1.2.90-106>.
- . "The Role of Ulama and Umara in the Modernization of Islamic Education in Bugis Land in the 20th Century." *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 1 (8 Agustus 2022): 137–59. <https://doi.org/10.21274/taalum.2022.10.1.137-159>.
- . "Ulama dan Umara dalam Modernisasi Pendidikan Islam di Tanah Bugis Abad XX." *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 1 (8 Agustus 2022): 137–59. <https://doi.org/10.21274/taalum.2022.10.1.137-159>.
- Deliar Noer. *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1987.
- Ellyasa KH. Dharwis. *Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil*. Cet. 2. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 1997.
- Faisal, Ahmad, Saidah Saidah, Mukrimin Mukrimin, Zakirah Zakirah, dan Rizal Darwis. "Sociological and Political Constraints of Islamic Sharia Enforcement in South Sulawesi Indonesia." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 22, no. 1 (24 Juni 2023): 159–69. <https://doi.org/10.31958/juris.v22i1.8604>.
- Fauzan Saleh. *Teologi Pembaruan; Pergeseran Wacana Islam Sunni di Indonesia Abad XX*. Cet. 1. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Fazlur Rahman. *Gelombang Perubahan dalam Islam; Studi tentang Fundamentalisme Islam*. Cet. 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Greg Barton and Greg Fealy. *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nabdatul Ulama-Negara*. Cet. 1. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 1997.
- Haedar Nashir. *Islam Syariat; Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*. Cet. 1. Bandung: Mizan, 2013.
- Hamid Awaludin. *Solusi JK (Logis, Spontan, Tegas, dan Jenaka)*. Cet. 2. Jakarta: Grasindo, 2016.
- Harun Nasution. *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*. Cet. 5. Bandung: Mizan, 1998.
- Hasbullah Masudin Yamin. *Perfektif Demokrasi untuk Islam Indonesia (Si'arkan Syari'at atas Nama Pancasila)*. Ed. 1. Cet. 1. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken dan Ireen Karang Hogenboom. *Politik Lokal di Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: yayasan pustaka obor indonesia, KITLV-Jakarta, 2014.

- Howard M. Federspiel. *Persatuan Islam: Pembaharuan Islam di Indonesia Abad XX*. Cet. 1. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.
- M. Zaki Mubarak. *Politik Syariat Islam: Ideologi dan Pragmatisme*. Cet. 1. Jakarta: Pustaka LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial), 2018.
- Martin van Bruinessen. *Contemporary Development in Indonesian Islam; Explaining the "Concervative Turn."* Pasir Panjang: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) Publishing, 2013.
- Mastuki HS. *Kiai Menggugat; Mengadili Pemikiran Kang Said*. Cet. 1. Jakarta: Fatma Press, 1999.
- Muchamad Ali Safa'at. *Dinamika Negara & Islam; dalam Perkembangan Hukum dan Politik di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Penerbit Konstitusi Press (Kopress), 2018.
- Muhamad Murtadlo. *Dinamika Sejarah Madrasah di Asia Tenggara*. Cet. 1. Ciputat: UIN Jakarta Press, 2018.
- Muhammad Zaitun Rasmin. "Pendidikan Islam dalam Perspektif Ulama Bugis KH. Lanre Said." *Jurnal Pendidikan Islam Ta'dibuna*, No. 1, Vol. 1 (April 2018).
- Mustofa Muhammad Asy-Syak'ah. *Islam Tidak Bermazhab*. Cet. 3. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Nurcholish Madjid. *Khazanah Intelektual Islam*. Cet. 2. Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- Pelras, Christian. *Manusia Bugis*. 1 ed. Jakarta: Nalar Bekerjasama dengan Jakarta-Faris Ecole Francaised'Extreme-Orient, 2006.
- Rahmatunnair, Rahmatunnair. "Dinamika penegakan syariat Islam di Sulawesi Selatan: Studi kasus di Kerajaan Bugis Tellumpoccoe." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 19, no. 2 (29 Desember 2020): 1122–32.
- Rifat Syauqi Nawawi. *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abdub; Kajian Masalah Akidah dan Ibadat*. Cet. 1. Jakarta: Paramadina, 2002.
- Sahilun A. Nasir. *Pemikiran Kalam (Teologi Islam); Sejarah, Ajaran, dan Perkembangannya*. Ed. 1-2. Cet. 2. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sri Yunanto. *Islam Moderat Vs Islam Radikal: Dinamika Politik Islam Kontemporer*. Cet. 1. Yogyakarta: Medpress, 2018.
- Suaidi Asyari. *Nalar Politik NU & Muhammadiyah; Over Crossing Java Sentris*. Cet. 2. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2010.
- Sukron Kamil. *Pemikiran Politik Islam Tematik; Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariat dan HAM, Fundamentalisme, dan Antikorupsi*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2013.
- Sulaiman Effendi. *Kiprah & Pemikiran Politik Tokoh-Tokoh Bangsa*. Cet. 1. Yogyakarta: IRCiSoD, 2014.
- Suwardi Endraswara. *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Cet. 5. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021.

Muhammad Dalle, Muhammad Jundi

Penegakkan Syariat Islam

Zuly Qodir. *Pembaharuan Pemikiran islam; Wacana dan Aksi Islam Indonesia*. Cet. 1.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.